

Implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran SKI di Madrasah Wilayah 3T Kabupaten Kepulauan Sangihe

Gina Nurvina Darise

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Indonesia

gnurvina@gmail.com

Elvira Mandiri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Indonesia

elviramandiri15@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.52593/pdg.06.2.01>

Submitted: 2025-04-05, Revised: 2025-07-30, Accepted: 2025-07-22, Published: 2025-07-31

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Merdeka Curriculum in the teaching of Islamic Cultural History (SKI) at three madrasas located in Indonesia's 3T regions (Outermost, Frontier, and Disadvantaged): MIN 2 Sangihe Islands, MTsN 1 Sangihe Islands, and MA Al-Aqsha Kendahe. The Sangihe Islands face unique geographical, socio-economic, and educational challenges that influence curriculum implementation. Employing a qualitative approach, data were collected through document analysis and in-depth interviews involving madrasa principals, curriculum vice principals, SKI teachers, and students. Findings indicate that implementation remains suboptimal due to several key challenges: (1) limited teacher capacity in developing teaching modules due to insufficient training; (2) lack of textbooks aligned with the new curriculum; (3) inadequate infrastructure, such as weak internet access and unstable electricity; and (4) a shortage of teachers, which hampers effective learning. The madrasas' stakeholders expect: (1) recruitment of more teachers through both civil servant (CPNS) and government contract (PPPK) schemes; (2) more comprehensive teacher training; (3) provision of appropriate textbooks; and (4) improvement of learning infrastructure.

Keywords: *Border Area; Islamic Cultural History (SKI); Merdeka Curriculum; Sangihe Islands; 3T Madrasah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di tiga madrasah yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), yaitu MIN 2 Kepulauan Sangihe, MTsN 1 Kepulauan Sangihe, dan MA Al-Aqsha Kendahe. Wilayah Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan geografis, sosial ekonomi, dan pendidikan yang khas, yang turut memengaruhi pelaksanaan kurikulum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan wawancara mendalam yang melibatkan kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, guru SKI, dan siswa sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran SKI di madrasah-madrasah tersebut belum optimal, disebabkan oleh beberapa kendala utama: (1) keterbatasan kemampuan guru dalam

menyusun modul ajar karena kurangnya pelatihan; (2) keterbatasan buku teks yang sesuai dengan kurikulum baru; (3) infrastruktur yang belum memadai, seperti jaringan internet yang lemah dan pasokan listrik yang tidak stabil; serta (4) kekurangan guru yang menghambat efektivitas pembelajaran. Harapan warga madrasah meliputi: (1) rekrutmen guru tambahan melalui jalur CPNS dan PPPK; (2) pemberian pelatihan yang memadai bagi guru; (3) penyediaan buku ajar yang sesuai; dan (4) peningkatan infrastruktur pembelajaran.

Kata Kunci: Daerah Perbatasan; Kepulauan Sangihe; Kurikulum Merdeka; Madrasah 3T; Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

A. Pendahuluan

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional agar lebih dinamis, relevan, dan (Asfiati, 2020; Darise, 2021). Kurikulum Merdeka hadir sebagai turunan dari kebijakan tersebut, dengan penekanan pada kemandirian belajar, diferensiasi pembelajaran, dan penguatan karakter peserta didik. Namun, penerapan Kurikulum Merdeka tidak serta-merta berjalan lancar. Berbagai penelitian menemukan bahwa pelaksanaan kurikulum ini masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), di mana aspek geografis, sarana pendidikan, dan ketersediaan guru masih menjadi kendala utama (Anridzo et al., 2022; Oktanadia et al., 2023; Pertiwi et al., 2022; Sairiltiata et al., 2023).

Salah satu wilayah 3T di Indonesia adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang berbatasan langsung dengan Filipina. Wilayah ini memiliki karakteristik daerah perbatasan dengan dinamika sosial dan tantangan pendidikan tersendiri. Terdapat 24 madrasah di wilayah ini, namun sebagian besar masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendidikan (Bapelitbang Sangihe, 2023; BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2023).

Fokus penelitian ini adalah implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di madrasah wilayah 3T. SKI merupakan mata pelajaran wajib di jenjang MI, MTs, dan MA, yang tidak hanya bertujuan menyampaikan fakta sejarah, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian siswa sesuai nilai-nilai Islam (Darise & Darise, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran SKI di madrasah 3T? Apa saja tantangan yang dihadapi guru? Apa harapan guru terhadap

keberlanjutan kurikulum ini? Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya menyediakan gambaran nyata mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka di wilayah yang secara geografis dan infrastruktur tergolong terbatas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengambil kebijakan, khususnya dalam merumuskan strategi pemerataan mutu pendidikan di daerah 3T. Selain itu, penelitian ini juga menjadi referensi penting dalam pengembangan praktik pembelajaran SKI yang kontekstual dan relevan dengan kondisi daerah perbatasan.

B. Teori/Konsep

Kurikulum dapat dipandang secara sempit sebagai serangkaian pengalaman yang memiliki tujuan dan maksud tertentu (Howson & Kingsbury, 2023) atau secara lebih luas untuk mencakup tujuan, konten, keselarasan, skala, kegiatan pembelajaran, penilaian, lingkungan fisik dan kolaborator pembelajaran dengan cara berpikir dan berpraktik sebagai kerangka konseptual (Barradell et al., 2018). Perubahan kurikulum tidak bisa dihindari. Kurikulum merupakan “spirit” pendidikan yang harus dievaluasi secara inovatif, dinamis dan berkala sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan pengguna lulusan (Suryaman, 2020). Kebijakan “Merdeka Belajar” merupakan gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional juga diharapkan mampu menciptakan suasana pendidikan yang dinamis dan menyenangkan.

1. Perencanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka

Perencanaan pembelajaran mencakup satuan pembelajaran yang akan dibahas selama beberapa pertemuan. Salah satu bagian dari program ini berfungsi sebagai acuan dalam Menyusun rencana pembelajaran sehingga dapat menjadi panduan bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran lebih terstruktur, berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Usman, 2017).

Modul ajar adalah perangkat atau rancangan pembelajaran yang didasarkan pada kurikulum yang digunakan dengan mencapai tujuan mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Modul ajar berperan penting dalam membantu guru merancang proses pembelajaran (Nesri & Kristanto, 2020). Secara ideal, guru diharapkan menyusun modul ajar secara optimal. Modul ajar merupakan inti dari Kurikulum Merdeka yang menggantikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Modul ajar ini memiliki format

bervariasi, mencakup materi pembelajaran, metode pengajaran, interpretasi, serta teknik evaluasi yang disusun secara sistematis dan menarik untuk mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan. Guru mengembangkan modul ajar sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu fungsi modul ajar adalah untuk meringankan beban guru dalam menyampaikan materi, sehingga mereka memiliki banyak waktu untuk bertindak sebagai tutor dan mendukung siswa selama proses pembelajaran (Maulida, 2022).

2. Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka

Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dalam Kurikulum Madrasah merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam mengenal, memahami, dan menghayati Sejarah Kebudayaan Islam. Hal ini kemudian membentuk dasar pandangan hidup mereka melalui berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan, penggunaan pengetahuan dan pembiasaan. Aspek fundamental dari mata pelajaran ini terletak pada kemampuan untuk menggali nilai, makna, aksioma, *ibrah/hikmah*, dalil dan teori dari fakta sejarah yang ada (Hasmar, 2020). Terdapat banyak metode yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, dengan tujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Keberhasilan metode tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesesuaian metode dengan materi ajar dan keterampilan guru dalam menerapkannya. Selain itu, guru dapat menggunakan berbagai metode dalam mata pelajaran tertentu untuk memastikan siswa tetap aktif terlibat dalam pembelajaran dan mengurangi kejenuhan, terutama dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) (Mahmud & Idham, 2017).

3. Evaluasi Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka

Evaluasi dalam Kurikulum Merdeka berfungsi untuk menilai pencapaian pembelajaran secara formatif dan sumatif. Evaluasi dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa dan efektivitas proses pembelajaran (Suardipa & Primayana, 2020). Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah kurikulum yang diterapkan telah sesuai dengan tujuan yang dicapai. Fungsi evaluasi mencakup: (1) mendapatkan data mengenai pencapaian tujuan atau tingkat pemahaman peserta didik terhadap isi kurikulum atau yang dikenal sebagai fungsi sumatif, (2) menilai efektivitas proses pembelajaran, apakah

program yang dirancang sudah optimal atau masih memerlukan perbaikan yang dikenal sebagai fungsi formatif (Mufidah, A et al., 2021).

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di madrasah wilayah 3T di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode ini dipilih untuk memahami secara kontekstual realitas yang terjadi di lapangan melalui penggalian data yang bersifat naratif dan alami (Sugiyono, 2011).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di tiga madrasah yang mewakili masing-masing jenjang, yakni MIN 2 Kepulauan Sangihe, MTsN 1 Kepulauan Sangihe, dan MA Al-Aqsha Kendahe. Ketiga madrasah tersebut dipilih karena berada di wilayah 3T dan telah menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu yang memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian (Prastowo, 2011), yang terdiri dari:

- a. Guru SKI sebanyak 3 orang dari masing-masing madrasah (disamarkan dengan kode G1, G2, G3).
- b. Kepala Madrasah dari masing-masing lembaga (K1, K2, K3).
- c. Wakil Kepala Bidang Kurikulum (W1).
- d. Siswa sebanyak 6 orang, masing-masing 2 siswa per madrasah (S1-S6).

Guru SKI menjadi sumber utama terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kepala dan Wakil Kepala Madrasah memberikan perspektif kebijakan dan strategi institusional, sementara Siswa memberikan pandangan dari sisi peserta didik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

- a. Observasi, untuk melihat langsung implementasi Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran SKI.

- b. Wawancara mendalam, dilakukan terhadap Guru SKI, Kepala Madrasah, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, dan Siswa.
- c. Dokumentasi, berupa foto dan dokumen pendukung seperti perangkat pembelajaran, silabus, dan modul ajar.

Wawancara guru difokuskan pada tiga aspek utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran SKI.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan:

- a. Reduksi data: menyaring data yang relevan.
- b. Penyajian data: menyusun dalam bentuk narasi dan tabel.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi: berdasarkan temuan yang telah dianalisis (Moleong, 2018)

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan metode pengumpulan data untuk menghindari bias (Moleong, 2018).

7. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di madrasah daerah 3T, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)

a. Perencanaan Pembelajaran

Dalam Kurikulum Merdeka, guru diberikan otonomi untuk menyusun perangkat ajar yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan sekolah (Purnawanto, 2022). Namun, hasil penelitian di tiga madrasah di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan variasi signifikan dalam kemampuan guru menyusun dan menggunakan modul ajar.

Guru SKI di MIN 2 Kepulauan Sangihe telah memiliki perangkat ajar digital lengkap seperti modul ajar, program semester, program tahunan, serta presensi dan daftar

nilai. Hal ini terjadi karena guru yang bersangkutan merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan pengalaman sebelumnya di Madrasah Kota, sehingga perangkat pembelajarannya tinggal diadaptasi.

Sebaliknya, di MTsN 1 Kepulauan Sangihe, penyusunan modul ajar masih berlangsung dan belum sepenuhnya digunakan dalam proses belajar-mengajar. Sementara itu, di MA Al-Aqsha Kendahe, guru SKI belum mulai menyusun modul ajar dan masih menggunakan RPP Kurikulum 2013. Minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis, keterbatasan jaringan internet, serta beban kerja ganda sebagai operator sekolah menjadi hambatan utama. Kepala Madrasah juga mengonfirmasi bahwa mereka belum pernah dilibatkan dalam pelatihan teknis Kurikulum Merdeka. Hal tersebut disampaikan langsung oleh guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di MA Al-Aqsha Kendahe: *“Saya belum menggunakan modul ajar dan masih menggunakan RPP Kurikulum 2013 yang hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dari pemerintah terkait Bimtek penyusunan modul ajar. Selain itu, saya juga disibukkan dengan tugas tambahan dari Kepala Madrasah, yakni sebagai operator.”*

Temuan ini dibenarkan oleh Kepala MA Al Aqsha Kendahe yang menyatakan bahwa selama pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum Merdeka, pihaknya belum pernah diundang maupun dilibatkan dalam sosialisasi terkait teknis pelaksanaannya. Ia juga menyampaikan bahwa para guru belum pernah mengikuti bimbingan teknis dalam penyusunan modul ajar. Untuk pelatihan secara daring pun, sekolah mengalami keterbatasan, baik dari segi jaringan internet yang tidak stabil maupun dari sisi waktu, karena para guru di sekolah tersebut tidak hanya mengajar, tetapi juga merangkap tugas lain seperti operator. Hal ini terjadi karena di MA Al-Aqsha Kendahe masih terdapat kekurangan tenaga pengajar. Ia menjelaskan bahwa jumlah guru yang terdaftar di SIMPATIKA hanya tiga orang untuk tiga rombongan belajar dengan total 36 siswa. Selebihnya, kegiatan pembelajaran dibantu oleh tenaga kependidikan yang juga merangkap sebagai pengajar, serta oleh para relawan dan guru dari sekolah lain yang menambah jam pelajaran di sekolah tersebut.

Kondisi ini mencerminkan keterputusan sistemik antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah 3T. Padahal, seperti ditegaskan oleh Tilaar (Tilaar, 2008), pendidikan di daerah tertinggal memerlukan dukungan diferensial, bukan perlakuan yang seragam. Kurangnya dukungan konkret dari sisi pelatihan dan infrastruktur menyebabkan

guru kesulitan untuk melaksanakan hakikat Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang fleksibel namun tetap terarah. Secara analitis, perencanaan pembelajaran yang tidak konsisten antar madrasah di daerah 3T menunjukkan ketimpangan kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas. Padahal, otonomi guru dalam Kurikulum Merdeka akan efektif hanya jika didukung dengan pelatihan intensif dan akses informasi yang memadai.

Ketiadaan modul ajar yang baik berimplikasi pada proses pembelajaran yang tidak sistematis, menyebabkan ketidakseimbangan peran guru dan siswa. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada murid yang menjadi inti filosofi Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran di madrasah daerah 3T, khususnya di Kepulauan Sangihe, membutuhkan dukungan teknis yang menyeluruh: dari pelatihan modul ajar yang kontekstual hingga penyediaan sarana pendukung digital. Tanpa hal tersebut, kebebasan guru dalam Kurikulum Merdeka justru dapat menjadi beban baru, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di madrasah wilayah 3T seperti Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya usaha dari para guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi setempat, meskipun belum sepenuhnya ideal. Menurut teori pembelajaran konstruktivistik, proses belajar yang bermakna terjadi ketika siswa terlibat secara aktif dan memiliki kesempatan untuk membangun pengetahuannya sendiri (Sugrah, 2019). Prinsip ini secara bertahap mulai diterapkan, meskipun masih menghadapi kendala.

Berdasarkan wawancara, sebagian besar guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Di saat listrik menyala dan jaringan internet memungkinkan, guru juga memanfaatkan media video atau film sejarah keislaman sebagai penguat visual materi pembelajaran, seperti kisah dakwah Rasulullah saw. atau periode Khulafaur Rasyidin. Guru SKI di MA Al-Aqsha Kendahe menuturkan: *“Selain metode ceramah, saya juga menggunakan metode diskusi dan presentasi makalah dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.”*

Metode yang beragam ini mendukung model pembelajaran aktif, tetapi penerapannya bergantung pada infrastruktur dan dukungan sumber daya. Di wilayah 3T, pembelajaran kontekstual seringkali terkendala oleh tidak stabilnya akses listrik dan internet, serta minimnya sarana seperti proyektor dan buku paket.

Salah satu persoalan krusial yang ditemukan adalah tidak tersedianya buku paket SKI yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Tanpa buku ajar resmi, guru harus menyusun materi sendiri, yang tentu membutuhkan waktu dan kapasitas pedagogik yang tidak semua guru miliki. Bagi siswa, ketiadaan buku ini menyulitkan dalam memahami materi secara utuh, mengurangi efektivitas pembelajaran mandiri, dan berpotensi menurunkan pencapaian belajar. Hal ini sejalan dengan penelitian Rostika (Rostika, 2016) yang menunjukkan bahwa buku teks berperan penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa secara signifikan.

Dalam konteks wilayah 3T, pelaksanaan pembelajaran yang bermutu sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara kapasitas guru, dukungan kebijakan, dan ketersediaan sarana. Meskipun guru telah mengupayakan variasi metode yang sesuai, keberhasilan pembelajaran masih sangat bergantung pada intervensi dari pihak eksternal-terutama dalam penyediaan buku, pelatihan, dan perbaikan infrastruktur.

c. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan komponen penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka karena berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan proses belajar mengajar. Dalam konteks ini, evaluasi tidak hanya bersifat sumatif, tetapi juga formatif untuk memberikan umpan balik berkelanjutan kepada siswa (Izza et al., 2020).

Guru-guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di madrasah wilayah 3T seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan kombinasi antara evaluasi lisan, tulisan, observasi, dan tugas sebagai bentuk asesmen. Misalnya, di MIN 2 Kepulauan Sangihe dan MTsN 1 Kepulauan Sangihe, guru melaksanakan evaluasi melalui ulangan harian dan observasi keaktifan siswa dalam diskusi. Sementara itu, di MA Al-Aqsha Kendahe, evaluasi dilakukan dengan menilai partisipasi dalam diskusi dan presentasi makalah. Guru SKI di madrasah tersebut menyatakan: *“Sampai saat ini kami belum mendapatkan workshop atau BIMTEK terkait dengan Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, kami masih bingung dalam penerapan Kurikulum Merdeka pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.”*

Kutipan tersebut mencerminkan kesenjangan pengetahuan yang dialami guru di daerah 3T dalam menerapkan asesmen berbasis Kurikulum Merdeka. Masih banyak guru yang menganggap asesmen hanya sebagai ulangan dan tidak memaksimalkan peran evaluasi sebagai alat refleksi dan diagnosis pembelajaran siswa. Bahkan, asesmen

formatif yang seharusnya digunakan untuk mengukur pemahaman siswa secara berkala dan memberikan umpan balik belum sepenuhnya diterapkan dengan optimal (Maisyaroh et al., 2023). Hal ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pelatihan, sumber belajar, serta jaringan internet yang tidak stabil.

Dalam konteks 3T, evaluasi pembelajaran tidak hanya membutuhkan pemahaman konsep, tetapi juga dukungan struktural dari pemerintah. Sosialisasi dan pelatihan sistematis sangat dibutuhkan agar guru tidak hanya tahu cara mengevaluasi, tetapi juga memahami tujuannya sesuai dengan arah Kurikulum Merdeka yang menekankan diferensiasi dan pengembangan potensi individu siswa.

Dengan demikian, evaluasi dalam Kurikulum Merdeka perlu dipahami bukan hanya sebagai mekanisme penilaian akhir, tetapi sebagai proses berkelanjutan yang memungkinkan guru memperbaiki strategi mengajar dan membantu siswa mencapai kompetensi pembelajaran secara optimal. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mempercepat distribusi pelatihan dan sumber daya agar kesenjangan pelaksanaan evaluasi di wilayah 3T dapat diminimalkan.

2. Tantangan dan Harapan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Madrasah Daerah 3 T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal)

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di madrasah daerah 3T seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Keterbatasan jumlah guru yang berstatus ASN menjadi isu utama. Seperti diungkapkan kepala MIN 2 Kepulauan Sangihe, *“Hanya dua guru PNS untuk enam rombongan belajar”*, sehingga pihak sekolah harus merekrut guru honorer untuk menutup kekurangan. Ini selaras dengan temuan Oktanadia dan kawan-kawan bahwa distribusi guru di wilayah 3T belum merata, yang menghambat implementasi kurikulum berbasis diferensiasi (Oktanadia et al., 2023).

Selain itu, tantangan infrastruktur seperti pemadaman listrik dan ketidakstabilan jaringan internet menjadi hambatan signifikan. Kepala MTsN Kepulauan Sangihe menyatakan: *“Di daerah ini sering terjadi pemadaman listrik yang berakibat pada ketidakstabilan jaringan internet. Jika listrik padam, jaringan internet juga tidak jadi.”*

Sehingga kami kesusahan jika harus mengirim data atau pun mengikuti kegiatan-kegiatan berbasis online seperti webinar tentang kurikulum merdeka.”

Kondisi ini menunjukkan kesenjangan digital yang masih nyata di wilayah 3T (Pertiwi et al., 2022), yang bertolak belakang dengan semangat transformasi digital dalam Kurikulum Merdeka. Keterbatasan sumber belajar juga menjadi masalah serius. Guru SKI MA Al-Aqsha Kendahe menyatakan bahwa mereka masih menggunakan buku paket K13 karena buku ajar Kurikulum Merdeka belum tersedia. Modul ajar juga belum disusun karena guru belum mengikuti pelatihan. Hal ini menandakan bahwa program pelatihan dan pendampingan guru belum menyentuh semua daerah, khususnya wilayah 3T, sehingga penerapan pembelajaran berdiferensiasi belum terlaksana secara optimal.

Kondisi ini menggambarkan bahwa akses ke sumber daya, pelatihan, dan teknologi menjadi aspek kunci yang belum terpenuhi, dan perlu dukungan lebih serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Tanpa intervensi sistemik, implementasi Kurikulum Merdeka hanya akan memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Meski banyak tantangan, warga madrasah di Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harapan besar terhadap Kurikulum Merdeka. Para guru berharap agar pelatihan seperti penyusunan modul ajar dan pembelajaran berdiferensiasi segera diselenggarakan secara intensif. Pendampingan dan pelatihan ini sangat penting karena pendekatan Kurikulum Merdeka menuntut guru berperan sebagai fasilitator yang adaptif (Kemendikbud, 2022).

Dari sisi siswa, kebutuhan paling mendesak adalah penambahan guru, perbaikan fasilitas seperti kamar mandi, dan ketersediaan buku cetak, seperti yang dituturkan oleh salah satu siswa MA Al-Aqsha Kendahe: *“Harapan kami agar MA Al-Aqsha Kendahe lebih maju lagi, guru ditambah lagi dan fasilitas sekolah seperti kamar mandi ditambah.”*

Harapan ini mencerminkan realitas bahwa pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur sangat menentukan kualitas pendidikan. Selain itu, akses listrik dan internet juga menjadi isu utama.

Siswa MTsN 1 Kepulauan Sangihe berharap: *“Semoga listrik stabil dan jaringan internet lancar, agar proses pembelajaran kami tidak terganggu.”*

Hal ini menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur teknologi dalam menunjang penerapan kurikulum yang fleksibel dan kontekstual.

Selain itu ketersediaan buku paket menjadi harapan dari siswa MIN 2 Kepulauan Sangihe: *“Kami berharap adanya buku cetak untuk memudahkan kami belajar, karena selama ini kami belum ada buku cetak.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa-siswa madrasah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, muncul beberapa harapan yang mencerminkan kebutuhan dasar dalam mendukung proses pembelajaran di daerah ini. Pertama, keinginan kuat agar jumlah guru ditambah. Ketersediaan tenaga pendidik yang mencukupi sangat krusial, mengingat bahwa keterbatasan jumlah guru dapat menghambat proses belajar mengajar terutama dalam memberikan pendampingan yang optimal kepada siswa. Selain itu para siswa juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas, khususnya penambahan kamar mandi. Fasilitas yang memadai bukan hanya mendukung kenyamanan dan kesehatan para siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Di daerah 3T seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe, ketersediaan fasilitas dasar seperti kamar mandi yang bersih dan memadai sangat esensial dalam menciptakan suasana belajar yang baik.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah kestabilan listrik dan jaringan internet. Di era digital seperti saat ini, akses terhadap listrik dan internet yang stabil merupakan prasyarat penting dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka yang memanfaatkan teknologi sebagai salah satu instrumen pembelajaran. Ketidakstabilan pasokan listrik dan keterbatasan akses internet tidak hanya menghambat penggunaan perangkat digital dalam proses pembelajaran, tetapi juga membatasi guru dan siswa untuk mengakses sumber belajar secara *online*, berkolaborasi dan berinovasi dalam pembelajaran. Dengan demikian, harapan warga madrasah di Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap implementasi kurikulum merdeka mencerminkan kebutuhan akan perbaikan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan cita-cita kurikulum merdeka di daerah 3T, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu memberikan perhatian khusus terhadap penyediaan fasilitas dasar, penambahan jumlah guru, serta stabilitas pasokan listrik dan jaringan internet. Implementasi yang optimal tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini, tetapi juga berkontribusi pada pengentasan kesenjangan pendidikan di Indonesia.

Selain itu salah satu kebutuhan mendesak yang diungkapkan oleh siswa-siswa madrasah di Kepulauan Sangihe adalah ketersediaan buku cetak. Selama ini, para siswa menghadapi kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran karena ketiadaan buku

cetak yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kondisi ini sangat menghambat proses belajar mengajar, terutama di wilayah yang akses internetnya terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk mengandalkan bahan ajar digital sebagai alternatif.

Buku cetak juga penting untuk memfasilitasi pembelajaran yang inklusif, di mana semua siswa termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke perangkat teknologi atau internet, tetap bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dalam konteks kurikulum merdeka yang menekankan pada diferensiasi dan keunikan proses belajar setiap individu, buku cetak memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar sesuai dengan ritme dan kebutuhan mereka masing-masing.

Oleh karena itu, warga madrasah di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki harapan besar agar pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat memastikan ketersediaan buku cetak yang memadai. Penyediaan buku cetak yang sesuai dengan kurikulum merdeka akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini dan sekaligus mendukung cita-cita untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah 3T dengan wilayah lain di Indonesia. Dengan adanya buku cetak, siswa di Kepulauan Sangihe akan memiliki alat yang lebih lengkap untuk memahami materi pelajaran, melakukan latihan soal, dan mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri. Hal ini diharapkan akan mendorong peningkatan prestasi belajar, sekaligus menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

E. Penutup

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di madrasah-madrasah wilayah 3T, seperti di Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Mulai dari keterbatasan pelatihan bagi guru, belum tersedianya buku ajar yang sesuai, hingga hambatan infrastruktur dan kekurangan tenaga pendidik. Namun, kondisi ini sekaligus membuka peluang untuk melakukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan solutif.

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi praktis dan kebijakan yang dapat diupayakan:

1. Pengembangan model pelatihan guru SKI yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan teknis wilayah 3T.

2. Distribusi buku ajar SKI Kurikulum Merdeka oleh Kementerian Agama secara merata ke madrasah-madrasah 3T.
3. Peningkatan akses infrastruktur pendidikan, seperti listrik dan internet, melalui kerja sama lintas sektor antara Kementerian Agama, Kominfo, dan pemerintah daerah.
4. Rekrutmen dan redistribusi guru SKI secara terencana ke daerah 3T, disertai dengan insentif khusus agar guru bersedia mengabdikan di wilayah terluar.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan madrasah-madrasah di wilayah 3T, termasuk di Kepulauan Sangihe, dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara lebih optimal, sehingga kualitas pendidikan Islam dapat dirasakan secara merata dan inklusif di seluruh pelosok negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anridzo, A. K., Arifin, I., & Wiyono, D. F. (2022). Implementasi Supervisi Klinis dalam Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5).
- Asfiati. (2020). *Visualisasi Dan Virtualisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Versi Program Merdeka Belajar Dalam Tiga Era (Revolusi Industri 5.0, Era Pandemi Covid-19 Dan Era New Normal)*. Kencana.
- Bapelitbang Sangihe. (2023). *Tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe*. <https://Sangihetab.go.id/Opd/Bapelitbang/>.
- Barradell, S., Barrie, S., & Peseta, T. (2018). Ways of thinking and practising: Highlighting the complexities of higher education curriculum. *Innovations in Education and Teaching International*, 55(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14703297.2017.1372299>
- BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe. (2023). *Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Angka 2023*. CV. Bahu Bahtera Indah.
- Darise, G. N. (2021). Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks “Merdeka Belajar.” *Islamic Education: The Teacher of Civilization*, 2, 2721–2149. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jpai.v2i2>
- Darise, G. N., & Darise, I. W. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Fase E di MAN Model 1 Plus Keterampilan Manado. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 17(2).
- Hasmar, A. H. (2020). PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI MADRASAH. *Jurnal MUDARRISUNA*, 10(1), 15–33. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.22373/jm.v10i1.6789>

- Howson, C. K., & Kingsbury, M. (2023). Curriculum change as transformational learning. *TEACHING IN HIGHER EDUCATION*, 28(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1940923>
- Izza, A. Z., Falah, M., & Susilawati, S. (2020). Studi Literatur: Problematika Evaluasi Pembelajaran Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan di Era Merdeka Belajar. *Proceeding Konferensi Ilmiah Universitas Pekalongan*.
- Kemendikbud. (2022). *Buku Saku Kurikulum Merdeka; Tanya Jawab*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Mahmud, S., & Idham, M. (2017). *Strategi Belajar-Mengajar*. Syiah Kuala University Press.
- Maisyaroh, I., Abdullah, M., & Hadi, M. N. (2023). Model Asesmen Sumatif dengan Menggunakan Metode Library Research untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Kurikulum Merdeka. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.46963/asatiza.v4i3.1063>
- Maulida, U. (2022). PENGEMBANGAN MODUL AJAR BERBASIS KURIKULUM MERDEKA. *Tarbawi*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.51476/tarbawi.v5i2.392>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Mufidah, A. M., Yusuf, M., Widyastono, H., & Subagya, S. (2021). The Analysis of the Implementation of Education Management Standard at State Special Schools. *Proceedings of the 5th International Conference on Learning Innovation and Quality Education*, 1–7.
- Nesri, F. D. P., & Kristanto, Y. D. (2020). Pengembangan Modul Ajar Berbantuan Teknologi Untuk Mengembangkan Kecakapan Abad 21 Siswa. *AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 9(3).
- Oktanadia, D., Indriani, E., Yulia, R., Marsidin, S., & Rifma, R. (2023). URGENSI SUPERVISI KLINIS DALAM PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA DI DAERAH 3T. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3).
- Pertiwi, A. D., Handayani, P. A., & Rostika, D. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka pada Daerah 3T di Era Revolusi 4.0. *Jurnal Basicedu*, 6(4). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3245>
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Purnawanto, A. T. (2022). PERENCANAAN PEMBELAJARAN BERMAKNA DAN ASESMEN KURIKULUM MERDEKA. *Jurnal Ilmiah Pedagogy*, 15(1), 76–94.
- Rostika, A. (2016). PENGARUH PENGGUNAAN BUKU PAKET TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SD. *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 55–64.

- Sairiltiata, S., Umarella, M., Johansz, D., Septory, J., Romiwy, Y., & Sila, C. E. D. R. M. (2023). Sosialisasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Guru-Guru di SDInpres Tomra di Wilayah Daerah 3T (Terdepan, Terpencil Dan Tertinggal). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(4). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i4.228>
- Suardipa, I. P., & Primayana, K. H. (2020). PERAN DESAIN EVALUASI PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN. *WIDYACARYA: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 4(2), 88–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.55115/widyacarya.v4i2.796>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan r&d*. Alfabeta.
- Sugrah, N. (2019). IMPLEMENTASI TEORI BELAJAR KONSTRUKTIVISME DALAM PEMBELAJARAN SAINS. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 19(2), 121–138.
- Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*.
- Tilaar, H. (2008). *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*. Remaja Rosdakarya.
- Usman, M. U. (2017). *Menjadi Guru Profesional*. Rosdakarya.